



Governance Brief

Kupu-kupu sayap burung musnah, masyarakat pegunungan Arfak menderita

Sumarlan

Staff pada Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor



Foto oleh Douglas Sheil

Salah satu dampak pelaksanaan desentralisasi yang berlangsung selama empat tahun, adalah makin maraknya perburuan kupu-kupu Sayap Burung (*Ornithoptera sp*) di daerah Pegunungan Arfak oleh pihak-pihak yang berasal dari luar masyarakat Arfak. Keadaan ini didorong oleh keterlibatan sebagian tokoh masyarakat, khususnya Kepala Suku. Terjadinya perburuan bebas ini, menyebabkan masyarakat Suku Arfak kehilangan penghasilan utamanya. Kenyataan ini terlihat dari penelitian yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April 2004 di Kecamatan Warmare dan Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua.

Pengelolaan Daerah Penyangga oleh YBLBC

Salah satu usaha perlindungan Cagar Alam Pegunungan Arfak adalah pemberdayaan masyarakat oleh Yayasan Bina Lestari Bumi Cenderawasih (YBLBC), WWF Manokwari, PHPA (Departemen Kehutanan) dan sebagian pendeta yang berada di pedalaman Pegunungan Arfak. Sejak tahun 1993, usaha yang dilakukan YBLBC adalah mengelola daerah penyangga dengan menangkarkan kupu-kupu dan bercocok tanam dengan hasil utama wortel, kentang, keladi dan bawang merah.

Dari berbagai usaha tersebut, yang paling menonjol adalah penangkaran kupu-kupu sayap burung. YBLBC memberi pelajaran pada masyarakat dalam menangkap kupu-kupu yang baik, hasil tangkapan tersebut kemudian dikembangkan dalam media penangkaran sampai dengan bertelur. YBLBC bekerjasama dengan Sub Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Manokwari membantu proses penjualan, termasuk proses perijinan.

Antara tahun 1993 sampai 2001, kupu-kupu merupakan andalan dan sekaligus ciri khas Manokwari baik di Indonesia maupun di dunia. Pada kurun waktu tersebut kesejahteraan masyarakat Pegunungan Arfak meningkat. Hal ini dapat terlihat dari telah terpenuhinya kebutuhan dasar, tercatat sejak tahun 1996 baru pertama kali ada anak Suku Arfak yang dapat mengenyam pendidikan menengah (SLTA), rumah beratap seng, dan masyarakat sudah mulai menabung.

Peran Pemerintah Daerah

Sejak otonomi daerah diberlakukan, sistem pengelolaan daerah penyangga yang dilakukan oleh YBLBC terganggu. Pemerintah Daerah membuat YBLBC "hidup enggan matipun tidak," sehingga usaha mendampingi masyarakat terhenti. Pemerintah Daerah melakukan hal ini karena merasa terancam dan tertinggal oleh kemandirian masyarakat. Anjuran-anjuran dari pemerintah tidak dipatuhi, sedangkan anjuran yang disampaikan YBLBC diikuti oleh anggota masyarakat. Sayangnya, YBLBC kurang mampu menjaga hubungan baik dengan pemerintah, sehingga komunikasi terputus.

Masyarakat yang berasal dari luar Pegunungan Arfak kini memburu kupu-kupu secara bebas dan menjual kupu-kupu ke luar daerah Manokwari. Karena masyarakat Pegunungan Arfak belum siap bersaing dengan masyarakat dari luar, hidup mereka menjadi tertekan dan menderita.

Karena kawasan tersebut merupakan Cagar Alam yang menjadi bagian daerah tanggung jawabnya, Departemen Kehutanan melalui Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan seharusnya berperan mengambil tindakan. Tetapi kenyataannya para petugas tersebut seolah menutup mata. Petugas Kehutanan pun dimusuhi oleh masyarakat setempat karena sering membiarkan masyarakat pendatang memburu dan memperdagangkan kupu-kupu secara bebas.

Peran Tokoh Masyarakat

Dalam tatanan masyarakat adat di Pegunungan Arfak, peran tokoh masyarakat sebagai pemegang hak ulayat sangat besar dalam mengelola daerah penyangga. Akan tetapi mereka juga (Kepala Suku) yang mengizinkan pendatang untuk menangkap dan memperdagangkan kupu-kupu. Masyarakat Pegunungan Arfak tidak dapat bersaing dengan pendatang, apalagi karena penjualan hasil tangkapan yang ditentukan oleh masyarakat

pendatang. Posisi tawar masyarakat Arfak sangat lemah. Tokoh masyarakat yang seharusnya mendukung kegiatan masyarakat luas ternyata lebih mementingkan kepentingannya sendiri.

Untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat Pegunungan Arfak yang telah menurun secara dratis, sebaiknya:

1) Pemerintah Daerah bekerjasama secara serius dengan Yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan lingkungan agar dapat membantu masyarakat supaya mandiri, sehingga beban pemerintah dapat dikurangi.

2) Pihak Yayasan atau LSM yang melakukan pendampingan atau advokasi kepada masyarakat, tidak menciptakan rasa ketergantungan masyarakat kepada lembaga tersebut, tetapi harus membuat masyarakat menjadi mandiri, agar dapat bersaing dengan anggota masyarakat yang lainnya.

3) Departemen Kehutanan yang mempunyai kewenangan pengelolaan daerah konservasi di cagar alam Pegunungan Arfak, berperan secara aktif untuk membantu masyarakat menjadi mandiri agar tidak melakukan penetrasi pada kawasan. Polisi dan Penyuluh Kehutanan harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Governance Brief ini ditulis dalam rangka partisipasi penulis dalam program "Building Leadership for Forest Reforms of the Future" yang diselenggarakan atas kerjasama CIFOR dan Ford Foundation Jakarta dan merupakan ringkasan tesis Program Pasca Sarjana (S2) Institut Pertanian Bogor, 2004 dengan judul "Peran Tokoh Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pemanfaatan Hutan Rakyat" (Kasus di kecamatan Warmare dan Prafi Kabupaten Manokwari).



Center for International Forestry Research, CIFOR
Alamat kantor: Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor Barat 16680, Indonesia.
Alamat surat: P.O. Box. 6596 JKPWB, Jakarta 10065
Indonesia

Tel: +62(251) 622 622 Fax: +62(251) 622 100
E-mail: cifor@cgiar.org
Website: www.cifor.cgiar.org
Foto sampul oleh Sumarlan



Program *Forests and Governance* di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.